

KORELASI ANTARAINFLASI DAN PENGANGGARAN

Oleh : H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si

ABSTRACT

Inflation and unemployment are the two important variables to see the economic condition in the country, inflation and unemployment have a negative relationship, when inflation rate has increases the unemployment rate will be crease (phillip curve). Inflation rate always increasing every year and if the government can't handle the inflation growth its possibly the economic crisis will happen again. This research aims how the inflation rate influence the unemployment rate during 2002-2012. The analysis shows that there is at least the inflation and unemployment have the significant influence.

Keywords : Inflation, Unemployment

A. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, yaitu rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan *output* riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/ kesempatan kerja yang tersedia (BI, 2003:62).

Beberapa tahun terakhir, banyak negara yang mengadopsi stabilitas harga atau inflasi sebagai sasaran tunggal dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter tanpa mengabaikan sasaran lainnya, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara implisit mengadopsi sasaran tunggal ini.

Permasalahan dalam bidang kependudukan berimplikasi pada masalah ketenagakerjaan. Dari tahun 2001-2010, Indonesia mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, yakni rata-rata sebesar 1,4 persen tiap tahun. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.71 persen. Angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2003 yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,45 persen. Rata-

rata peningkatan angkatan kerja yang terjadi di Indonesia adalah sebesar 1,9 persen per tahun.

Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak diimbangi oleh tingginya penyerapan tenaga kerja yang ada. Akibat dari kurangnya penyerapan tenaga kerja akan menimbulkan pengangguran. Dari tahun 2001-2010, Indonesia mengalami masalah pengangguran yang tidak ringan. Pengangguran pada tahun 2001-2006 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu melebihi 8 persen per tahun. Bahkan pada tahun 2006, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 10,27 persen. Rata – rata tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2001 – 2010 adalah sebesar 1.4 persen, sedangkan rata- rata tingkat pengangguran sebesar 9 persen. Berikut data tentang tingkat pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, pengangguran, dan persentase bekerja terhadap angkatan kerja dari tahun 2001 -2010 tersaji pada Tabel 1.1

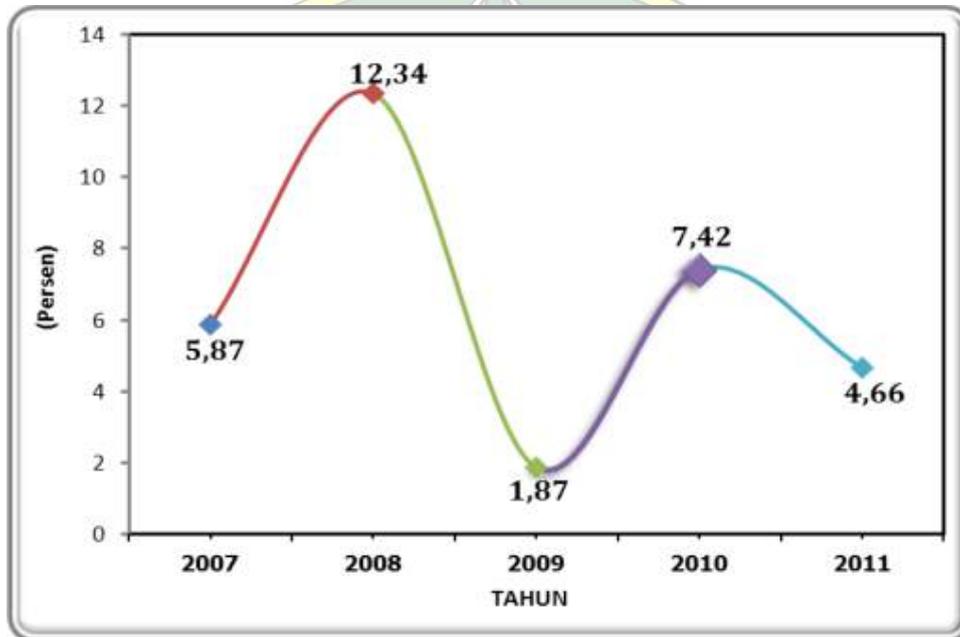
TABEL 1.1 TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK, ANGKATAN KERJA, PENGANGGURAN DAN PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA TERHADAP ANGKATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2001 – 2010

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (persen)	Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja (persen)	Tingkat Pengangguran (persen)	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (persen)
2001	1,36	3,3	8,1	9,19
2002	1,34	1,99	9,06	90,94
2003	1,33	-0,45	9,9	90,5
2004	1,32	3,64	9,85	90,14
2005	1,3	1,75	10,25	89,74
2006	0,97	0,55	10,27	89,72
2007	1,28	3,33	9,1	90,89
2008	1,61	1,82	8,39	91,61
2009	1,24	1,68	7,87	92,13
2010	2,71	2,36	7,13	92,86
Rata-Rata	1,44	1,99	8,9	91,04

Sumber : Statistik Tahunan Indonesia, BPS 2001 – 2010

Melalui UU No.23 tahun 1999 dengan amandemen UU No.3 tahun 2004 hal itu memberikan landasan kuat bagi penerapan kerangka kerja *inflation targeting* di Indonesia. Disebutkan bahwa pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai uang, yaitu kestabilan inflasi dan nilai tukar. Pemahaman sistem nilai tukar yang dimaksud adalah penentuan nilai tukar Rupiah yang ditentukan oleh mekanisme pasar (*free floating system*), maka stabilitas inflasi tetap merupakan tujuan yang diutamakan. Di sisi lain tingkat pengangguran diharapkan turun.

Berikut grafik inflasi kota padangsidempuan dari tahun 2007 – 2011



Sumber : BPS Kota Padangsidempuan, tahun 2007 – 2011

Dengan mengadopsi stabilitas harga atau inflasi sebagai sasaran tunggal dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja yang berarti menurunkan tingkat pengangguran. Dengan menurunnya tingkat pengangguran secara implisit akan menstabilkan inflasi.

B. Pembahasan

Dalam bukunya "Economics-Pengantar Mikro dan Makro", Iskandar Putong memberi pengertian inflasi sebagai proses kenaikan

harga-harga umum secara terus menerus. Sedangkan kebalikannya adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga.

Terdapat 3 teori utama yang menerangkan mengenai inflasi yaitu :

1. Teori Kuantitas (Persamaan Pertukaran dari Irving Fisher $\rightarrow MV = PQ$).
2. Teori Keynes yang mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya.
3. Teori Strukturalis atau Teori Inflasi Jangka Panjang. Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ketegaran suplay bahan makanan dan barang-barang ekspor.

1. Jenis inflasi

Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju unflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga umum, dan diukur sebagai berikut :

$$\frac{\text{tingkatharg } a(\text{tahunt}) - \text{tingkatharg } a(\text{tahunt} - 1)}{\text{tingkatharg } a(t - 1)} \times 100$$

Secara konseptual tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya kita mengukur tingkat harga keseluruhan dengan membuat indeks harga, yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen.

Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang-barang dan jasa-jasa; dalam membuat indeks harga, para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks-indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen IHK, deflator GNP, dan indeks harga produksi IHP.

Inflasi menurut Nopirin adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus.¹ Sedangkan, Sukirno (2008)

inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.²

- Menurut sifatnya :
 - **Inflasi rendah (creeping inflation)** yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% / tahun
 - **Inflasi menengah (galloping Inflation)** besarnya antara 10%-30% / tahun. Inflasi ini biasanya inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30% dan sebagainya.
 - **Inflasi berat (high inflation)** yaitu inflasi yang besarnya antara 30%-100% / tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
 - **Inflasi sangat tinggi (hyper Inflasi)** yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.³
- Versi Samuelson :
 - Moderat Inflation kurang dari 10%
 - Galloping Inflation antara 20%-200%/ tahun
 - Hyper Inflation di atas 200%
- Menurut sebabnya :
 - **Demand Pull Inflation.** Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak, dipihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja.
 - **Cost Push Inflation.** Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/ menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan

sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen yaitu :

1. Langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau
2. Harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

• Menurut asalnya :

- *Domestic Inflation* yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dan lain sebagainya.
- *Import inflation* yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

Sedangkan dalam ekonomi Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam-namun dinar dan dirham di sini adalah dalam artian yang sebenarnya yaitu yang dalam bentuk emas maupun perak bukan dinar-dirham yang sekedar nama. Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa Syeikh An-Nabahani (2001 : 147) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak. Padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.⁴

2. Dampak Inflasi

- Dampak negatif antara lain : a) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, b) Melemahkan semangat untuk menabung, c) Meningkatkan kecenderungan untuk belanja, d) Penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, e) Masyarakat panik menyebabkan perekonomian abnormal, f) Pengerukan tabungan dan penumpukan barang, g) Permainan harga di atas standar kemampuan, h) Distribusi barang relatif tidak stabil dan

terkonsentrasi, i) Dalam jangka panjang akan membangkrutkan produsen.

- Dampak positif antara lain : a) Penjualan barang-barang mewah relatif semakin mantap, menguntungkan bagi pemasar barang mewah tentunya, b) Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, c) Produksi akan semakin efisien dan konsumtifisme dapat ditekan, d) Menumbuhkan industri kecil dalam negeri semakin tangguh, e) Tingkat pengangguran akan menurun karena masyarakat tergerak melakukan kegiatan produktif.

3. Tingkat Pengangguran

Yang dimaksud dengan pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.⁵ (Iskandar Putong, "Economics-Pengantar Mikro dan Makro", edisi kedua, hal 406).

Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi diatas usia anak-anak (relatif diatas 6 – 18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD – tamat SMU). Sedangkan diatas usia 18 tahun namun masih sekolah dapatlah dikategorikan sebagai penganggur, meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya.

Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan tetapi mashab klasik dengan salah satu teorinya yang terkenal sebagai Hukum "Say" dari Jean Baptiste Say yang mengatakan bahwa "*Supplay creates its town demand*" atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi maka pengangguran tidak akan ada, bahwa bila produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu maka akan segera habis dikonsumsi masyarakat.

Pada saat yang sama misalkan terdapat para pencari kerja, oleh karena produsen akan lebih baik menghasilkan barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko gagal dalam penjualan maka semua pencari kerja itu akan terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen/ perusahaan, dan ini berlangsung terus. Akan tetapi pada kenyataannya tidak satu negarapun

didunia ini yang bisa dan tak akan pernah terjadi, dikarenakan syaratnya yang tidak mungkin bisa dipenuhi.

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut.⁶ Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong.⁷

Pengangguran selalu menjadi masalah, bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana ? Akan tetapi juga memberikan dampak sosial yang tidak baik misalkan akan semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi di sisi lain pengangguran atau menganggur umumnya dilakukan dengan sukarela, baik karena memilih pekerjaan, menunggu pekerjaan yang sesuai, keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena alasan jenuh, bosan atau tidak cocok dengan pekerjaan dan perusahaan, dan berbagai macam alasan lainnya.

Berdasarkan kenyataan yang ada, pengangguran terdiri atas tiga jenis yaitu :

1. Pengangguran Siklis

Yaitu pengangguran yang terjadi apabila permintaan lebih rendah dari output potensial perekonomian, yaitu manakala kemampuan ekonomi suatu bangsa lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain GNP aktual lebih rendah dari GNP potensial (yang dimaksud dengan GNP potensial adalah GNP yang dapat dihasilkan dalam kondisi tingkat pekerjaan penuh/ *full employment*). Jenis pengangguran ini dikatakan sebagai pengangguran terpaksa, karena banyak tenaga kerja yang ingin bekerja dengan tingkat upah yang berlaku namun pekerjaan itu tidak tersedia., karena alasan di atas tadi. Kapasitas produksi baru melalui investasi baru tidak bisa dilakukan karena pendapatan nasional lebih rendah dari kemampuan sebenarnya. Pengangguran siklis dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja dikurangi jumlah orang yang seharusnya mempunyai pekerjaan pada tingkat pendapatan potensial.

2. Pengangguran Friksional

Yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan ketenagakerjaan. Artinya pengangguran itu ada karena adanya angkatan kerja baru yang siap memasuki lapangan kerja, sementara itu ada juga mereka yang telah bekerja keluar dari pekerjaannya karena tidak cocok, bosan atau karena alasan lainnya seperti misalnya ingin mencari pengalaman kerja baru dengan pekerjaan baru. Dengan kata lain penganggur friksi adalah orang yang menganggur sambil mencari pekerjaan. Pengangguran jenis ini digolongkan sebagai pengangguran sukarela, alasannya mereka yang baru akan memasuki lapangan kerja telah meluangkan waktu mencari kerjanya untuk menempuh pendidikan dan menambah keterampilan, sementara itu orang yang telah bekerja keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan baru, dan juga menganggur karena telah memiliki uang yang cukup (deposito) untuk membiayai hidupnya dan lain sebagainya.

3. Pengangguran Struktural

Yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidak sesuaian antara struktur angkatan kerja, berdasarkan pendidikan dan keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, informasi, dan tentu saja struktur permintaan tenaga kerja. Penyebab pengangguran struktural ini dapat bersifat alami misalkan karena adanya trend kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian tertentu, atau juga karena kebijakan (pemerintah), misalnya adanya kebijakan pengisian lapangan kerja di daerah tertentu yang tidak semua orang yang mau meskipun sebenarnya memenuhi syarat, kebijakan upah dan proyek padat modal.⁸

Berdasarkan prakteknya, pengangguran dapat digolongkan menjadi :

- ❑ Penganggur penuh, yaitu yang benar-benar tidak dan belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.
- ❑ Setengah penganggur, yaitu orang yang bekerja akan tetapi tenaganya tidaklah proporsional dengan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, kadang $\frac{1}{2}$ penganggur disebut juga penganggur tidak kentara, yang lainnya adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan atau keahliannya juga digolongkan sebagai penganggur, karena orang ini sebenarnya melakukan pekerjaan yang tidak

seharusnya dia kerjakan, atau dengan kata lain ia sedang melakukan pekerjaan orang lain yang lebih berhak.

Pengangguran struktural ada yang menggolongkannya sebagai pengangguran sukarela, dengan alasan karena tidak bersedia ditempatkan, menolak pekerjaan karena alasan pendidikan yang tinggi, atau mau bekerja meskipun tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. Yang menggolongkan sebagai pengangguran terpaksa (*involuntary*) beralasan bahwa pengangguran terjadi karena adanya kebijakan pemerintah baik berupa penentuan upah minimum dan pembayaran THR, sehingga banyak perusahaan yang enggan mencari tambahan tenaga kerja baru atau bahkan mem PHK karyawan lamanya, atau informasi lowongan kerja yang tidak dipublikasikan dan lain sebagainya.

4. Inflasi Dan Tingkat Pengangguran

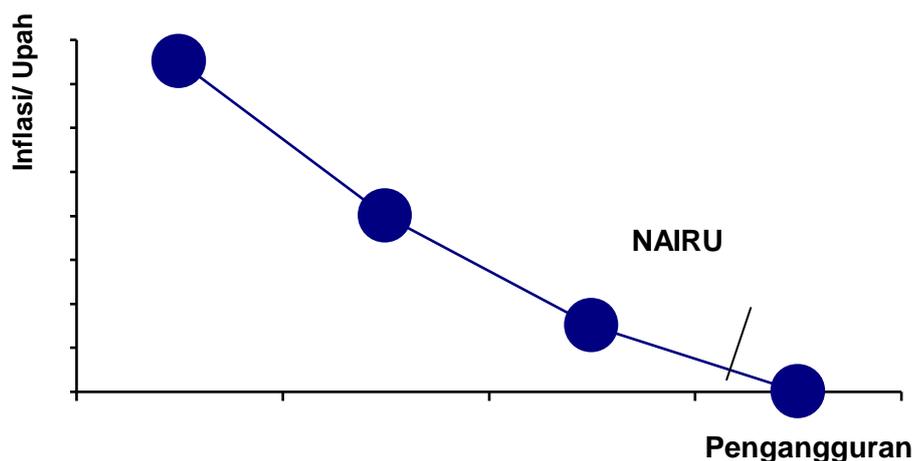
Arti inflansi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat di atas, sebagaimana diketahui bahwa manakala inflansi terlalu tinggi maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, akan tetapi akan dirubah dalam bentuk barang baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi (membuat rumah misalnya). Sementara penganggur adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Dalam kondisi tingkat inflansi yang relatif tinggi maka secara teoritis para penganggur akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, akan tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment.

Sampai sebegitu jauh agaknya inflansi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif ketimbang positif bagi suatu bangsa dalam perekonomiannya, alasannya sederhana saja karena banyak negara yang mengelola ekonominya tidak efisien, hambatan investasi, dan masih tergantung sangat besar (baik dari segi kualitas maupun kuantitas) pada baku impor. Kenyataannya inflasi yang relatif tinggi membuat masyarakat hidup berhemat, banyak PHK dan penurunan jumlah produksi sehingga lebih tinggi.

Prof. A.W Phillips dari London School of Economics, Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan

inflasi. Secara empirik tanpa didasari teori yang kuat ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran, dalam arti apabila inflasi naik maka pengangguran turun, sebaliknya apabila inflasi turun maka pengangguran naik. Dasar teori dari Phillips memang tidak ada untuk bisa membuktikan sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Hanya saja bila digambarkan dalam suatu kurva maka temuan secara empirik dari Phillips itu adalah sebagai berikut :



Gambar. Kurva Philip

Guna memperjelas kenyataan empirik tersebut di atas, secara teori, Lipsey menerangkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran melalui teori pasar tenaga kerja. Menurutnya upah tenaga kerja akan cenderung turun bila pengangguran relatif banyak, karena banyaknya tingkat pengangguran mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya upah tenaga kerja akan naik bila tingkat pengangguran relatif rendah, karena adanya kelebihan permintaan tenaga kerja.

Namun meskipun pada suatu kondisi terdapat keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang memberikan tingkat upah tertentu, pengangguran masih saja tetap ada, hal ini dikarenakan informasi yang kurang, keahlian yang tidak sesuai dengan lowongan dan lain sebagainya. Kondisi ini sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar kurva di atas perpotongan antara sumbu tingkat pengangguran dengan

kurva Phillips oleh Lipsey disebut NAIRU (Natural rate of Unemployment).

Jadi menurut Lipsey sehubungan dengan kurva Phillips, penawaran dan permintaan itu menentukan tingkat upah dan perubahan tingkat upah tergantung dari adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian makin besar kelebihan permintaan tenaga kerja maka tingkat upah akan semakin besar, ini berarti tingkat pengangguran akan semakin kecil/ rendah. Karena hubungan antara kelebihan permintaan tenaga kerja sebanding dengan kenaikan upah, maka berarti bila tingkat upah tinggi maka pengangguran rendah, sebaliknya bila tingkat upah rendah maka pengangguran tinggi. Tapi bila dibalik pernyataannya menjadi bila tingkat pengangguran tinggi maka upah rendah, dan bila pengangguran rendah maka upah tinggi (hubungan ini dapat dilihat pada gambar di atas). Perlu diingat bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa bila upah riil sama dengan upah nominal, dimana upah riil adalah upah nominal dibagi dengan harga yang berlaku.

Terkait dengan fungsi pokok pemerintah daerah dalam pemberdayaan politik masyarakat (BS Sispenas, 2007:4) dalam meningkatkan sumber daya manusia guna mengatasi pengangguran upaya-upaya berikut perlu dilakukan :

1. Melakukan berbagai pelatihan/kursus berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, didahului oleh *training needs assessment* dengan mensinergikan program yang dirancang dinas pendidikan, organisasi profesi, kalangan industri dan kalangan *stakeholders* pendidikan yang lain.
2. Memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang dikelola pusat kegiatan belajar masyarakat dengan memperluas cakupan program bukan hanya baca, tulis dan hitung (*calistung*) dengan berbagai ketrampilan ekonomi produktif.
3. Meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan. Komitmen Pemda untuk menjadi pusat perkembangan sekolah kejuruan terus didorong dengan peningkatan penguasaan kecakapan hidup (*life skills*) di kalangan siswa sehingga mereka bisa menjadi *entrepreneur*.
4. Memperkuat landasan kultural pendidikan sebagai terapi budaya, yang didasarkan atas komitmen untuk a) memelihara eksistensi Negara dan bangsa; b) memelihara integrasi nasional, yakni keutuhan ideologis Pancasila dan UUD 1945, sosial dan integrasi

territorial, dan c) melaksanakan pembangunan guna mempercepat recovery melalui penguatan pendidikan karakter baik melalui jalur sekolah, maupun melalui organisasi kemasyarakatan pemuda.

5. Meningkatkan *skill, knowledge, dan ability* aparatur sehingga dapat mewujudkan fungsinya dalam pemberdayaan politik masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tangguh, serta membangkitkan karsa di tengah-tengah masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah hubungan antara tingkat upah dengan inflasi sehubungan dengan penjelasan teoritis untuk kurva Phillips ?. Lihatlah kembali salah satu penyebab inflasi yang telah dijelaskan di atas yaitu pada Cost Push inflation, di mana salah satu penyebab naiknya harga barang adalah tuntutan kenaikan upah, sehingga untuk mengatasi biaya produksi dan operasi maka harga produk dijual dengan harga yang relatif mahal dari sebelumnya (artinya manakala upah tinggi maka tingkat inflasi tinggi, dan sebaliknya).

C. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

1. Kesimpulan

- a. Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.
- b. Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Selain itu pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur (pengangguran sukarela).

2. Implikasi Kebijakan

- a. Inflasi bukanlah masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya pendapatan yang lebih besar dari % tingkat inflasi tersebut (daya beli masyarakat meningkat lebih besar dari tingkat inflasi). Akan

tetapi manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya juga menjadi relatif tinggi sementara disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang “membahayakan” apalagi bila berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap tingkat pendapatan (daya beli)

- b. Pengangguran selalu saja ada dalam suatu perekonomian, maka sebenarnya pengangguran itu bukanlah masalah yang berat dan membahayakan, karena sesuatu yang selalu ada dan bahkan harus selalu ada termasuk hal yang menguntungkan bila bisa dikelola dengan baik dalam kondisi yang juga baik. Kondisi yang diharapkan bukanlah bagaimana mempekerjakan semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan dengan menyediakan lapangan kerja bagi mereka secara sporadis, karena akan membahayakan kondisi perekonomian bila ditinjau dari sisi lainnya, akan tetapi bagaimana caranya agar setiap lowongan kerja yang disediakan pada suatu periode tertentu dapat terisi semuanya oleh para pencari kerja. Kondisi inilah dalam ilmu ekonomi disebut sebagai “*Full Employment*”.

¹ Nopirin, *Ekonomi Moneter, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2000, hal 25

² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 8

³ Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1998, hal. 162

⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 2007. Hal 146

⁵ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, 2007, hal 406

⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 12

⁷ Ibid. Sadono Sukirno

⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005),